

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik telah mendorong pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif (*quailitative characteristics*). Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, telah disebutkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan, 4) dapat dipahami.

Menurut Wahyono (2004: 12) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan), disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya. Sumber daya manusia yang pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi.

Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Basis akuntansi yang diterapkanpun mengalami perubahan dari basis kas (*cash basis*) ke basis akrual (*accrual basis*) (Ariesta, 2013). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada (Ariesta, 2013). Kebijakan untuk melakukan

aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan dibidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan didukung adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Jugiyanto (1995: 41) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Di masa sekarang ini, apalagi masa yang akan datang, tugas-tugas atau pekerjaan manusia dalam organisasi banyak yang telah dapat digantikan oleh komputer termasuk dalam bidang akuntansi. Sulit rasanya menghindari teknologi ini, apalagi jika organisasi memang telah saatnya dibantu oleh komputer. Proses pengolahan data akuntansi akan dapat dilakukan dengan lebih cepat bila digunakan komputer. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan komputer untuk mengolah data yang jauh melebihi kecepatan manusia.

Sangat sedikit aspek-aspek yang tidak terpengaruh oleh munculnya komputer. Selain mempengaruhi cara pemrosesan dan penyimpanan data, komputer juga sangat mempengaruhi cara organisasi perusahaan, cara pengambilan keputusan, serta pemanfaatan fungsi akunting perusahaan (Wilkinson, 1992).

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat memudahkan berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Laporan keuangan yang baik tentunya tidak dapat dipisahkan dari faktor sumber daya manusia dalam hal ini pegawai dan juga teknologi yang memadai. Sumber daya manusia yang berkualitas dan ditunjang dengan teknologi yang memadai, juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, karena pegawai tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan serta ditunjang dengan teknologi dalam hal ini komputer. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan wawancara pada hari kamis 30 April 2015, bapak Ronal Idrus selaku staf bagian akuntansi di DPPKAD Kota Gorontalo mengungkapkan bahwa:

“segala hal yang menyangkut tentang kualitas laporan keuangan, pihak BPKIah yang menilainya, dan pada periode 2012-2013 laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo masih memperoleh opini WDP (wajar dengan pengecualian) yang berarti laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo pada periode bersangkutan masih sedikit bermasalah. Beliau juga mengungkapkan bahwa masalah lain yang ikut mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah kota gorontalo adalah masalah-masalah tak terduga seperti bencana alam, pesta demokrasi dan lain-lain, masalah tersebut sering menghambat pemerintah Kota Gorontalo dalam penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Bapak Ronal

menambahkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Gorontalo belum menerapkan SAP basis akrual, hal ini diakibatkan oleh sebagian besar aparatur Pemerintah Kota Gorontalo masih belum memahami SAP basis akrual, karena basis akrual dirasa lebih sulit jika dibandingkan dengan basis kas menuju akrual. Masalah-masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi informasi. Pada DPPKAD Kota Gorontalo masih terdapat beberapa sumber daya manusia yang kurang memahami cara menggunakan teknologi informasi, hal ini merupakan sebuah masalah besar bagi pemerintah Kota Gorontalo, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut DPPKAD Kota Gorontalo sering mengadakan BIMTEK (Bimbingan Teknis)".

Periode 2012-2013 BPK masih menemukan beberapa kelemahan yang mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo belum disajikan secara andal sehingga masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- a. Pemerintah Kota Gorontalo belum menatausahakan BMD secara memadai sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pemerintah Kota Gorontalo belum menginventarisasi serta penggunaan asset/BMD Pemerintah Kota Gorontalo yang digunakan oleh Yayasan Al-Adha. (<http://www.gorontalo.bpk.go.id>).

Periode 2013-2014 menurut pendapat BPK, Pemerintah Kota Gorontalo telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Gorontalo per 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Gorontalo telah mampu memperbaiki

pengelolaan keuangan sehingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini WTP tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Peningkatan opini ini merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan, buah dari hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran pemerintah Kota Gorontalo. Kendati WTP, namun bukan berarti tanpa temuan. BPK memberikan beberapa catatan hasil temuan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Di Pemerintah Kota Gorontalo terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas ke luar daerah (SPPD). (<http://www.gorontalo.bpk.go.id>).

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian empiris dengan mengangkat judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. (Studi Kasus Pada SKPD Se-Kota Gorontalo).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya pemahaman Sumber Daya Manusia terhadap SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengetahuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi informasi belum maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo?
2. Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan pula menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam pengelolaan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan laporan keuangan.